

SOSIALISASI PEMILIHAN KEPALA DESA SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN KEDAULATAN MASYARAKAT DESA DI DESA SABUHUR KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT

Muhammad Najeri Al Syahrin

Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lambung Mangkurat

Abstrak

Sosialisasi pemilu selama ini masih menggunakan model strategi yang sama untuk semua khalayak, baik para pemilih perkotaan maupun masyarakat pedesaan. Padahal para pemilih memiliki karakteristik demografi, sosial ekonomi, budaya dan keunikan yang berbeda. Teridentifikasi kesulitan bagi para pemilih di kawasan pedesaan untuk menentukan hak pilih dalam pemilu karena keterbatasan informasi mengenai sistem dan teknis pemilihan kepala desa. Kondisi ini dikhawatirkan akan menyebabkan para pemilih memutuskan untuk bersikap abai terhadap pemilu (golput) termasuk juga dalam kegiatan pemilihan kepala desa. Kegiatan ini dilakukan melalui kombinasi metode pendidikan masyarakat dan metode pelatihan. Metode Pendidikan dilakukan dengan metode sosialisasi pada masyarakat desa sehingga mereka bisa menerapkan pengetahuan tersebut dan menggunakan hak pilihnya. Sedangkan metode pelatihan yaitu metode kegiatan yang melibatkan substansi kegiatan yang disertai dengan demonstrasi atau percontohan untuk realisasinya. Dalam metode ini diberikan simulasi latihan mengenai kepemiluan sehingga para pemilih bisa menerapkan tata cara dan praktik pilkades secara lebih teknis. Para penduduk desa yang mengikuti kegiatan sangat antusias mendengarkan pelatihan yang disampaikan, hal ini terlihat dari banyaknya penduduk desa yang bertanya dan ingin mendapatkan penjelasan lebih mendalam tentang bagaimana cara memilih yang baik, termasuk memilih kandidat dalam pemilu.

Kata kunci: Sosialisasi, Pemilihan Kepala Desa, Masyarakat Desa, Partisipasi

Abstract

Election socialization so far still uses the same strategy model for all audiences, both urban voters and rural communities. Whereas the voters have different demographic, socioeconomic, cultural and unique characteristics. It identified difficulties for voters in rural areas to determine the right to vote in elections due to limited information about the electoral system. It is feared that this condition will cause voters to decide to be ignorant of the election (turnout) including in the village head election activities. This activity is carried out through a combination of community education methods and training methods. The education method is carried out by socializing the village community so that they can apply this knowledge and exercise their voting rights. While the training method is an activity method that involves the substance of the activity accompanied by a demonstration or pilot for its realization. In this method, simulations or exercises on ownership are given so that voters can apply election procedures and practices more technically. The villagers who followed the activity were very enthusiastic about listening to the training delivered, this can be seen from the many villagers who asked questions and wanted to get a more in-depth explanation of how to vote well, including choosing candidates in elections.

Keywords: Socialization, Village Head Election, Village Community, Participation

Correspondence author: M Najeri Al Syahrin, najeri_syahrin@ulm.ac.id, Banjarmasin, Indonesia



This work is licensed under a CC-BY-NC

PENDAHULUAN

Implementasi UU No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa membawa dampak yang sangat fundamental terhadap sistem pemerintahan desa. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahan otonom secara nyata. Perkembangan tata pemerintahan yang mengalami lompatan yang sangat signifikan. Namun dibalik hal tersebut tersimpan konsekuensi dimana masyarakat desa harus berperan aktif sebagai subjek pembangunan. Permasalahan yang sering terjadi, masih banyak masyarakat desa yang tidak memiliki kesadaran dan kemampuan untuk berperan sebagai subjek pembangunan desa. Inilah salah satu tantangan yang harus dipecahkan oleh perguruan tinggi agar Pemerintahan desa dapat dijalankan secara demokratis dengan mengubah posisi masyarakat desa sebagai objek menuju subjek pembangunan, melalui program pemberdayaan masyarakat desa.¹

Salah satu permasalahan desa tersebut adalah pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades). Masyarakat banyak yang tidak mengetahui tentang proses persiapan dan pelaksanaan serta pencalonan kepala desa, hal ini membuat masyarakat bingung mengenai bagaimana asal mula pemilihan kepala desa, mulai dari tidak tahu mengenai seluk-beluk pemilihan kepala desa yang tak hanya satu kali diikuti, padahal didalam pemilihan tersebut terdapat peraturan-peraturan yang mengikat bagi calon kepala desa yang ikut mencalonkan diri dalam pilkades.

Pemilihan umum kepala desa merupakan instrumen pokok dalam menerapkan prinsip demokrasi. Partisipasi pemilih dalam pemilu menjadi salah satu indikator serta tolak ukur keberhasilan jalannya proses demokrasi. Hasil pemilu dengan derajat legitimasi yang kuat serta jumlah angka partisipasi pemilih juga menjadi acuan bagi kesuksesan sistem politik.² Ironisnya di Indonesia, yang menganut sistem demokrasi, keterlibatan pemilih selama ini cukup memprihatinkan. Jika dibuat rata-rata, tingkat golput selama pelaksanaan pemilihan umum mencapai angka 27.9%.³ Angka dari data tersebut bukan sekadar masalah kuantitatif. Namun erat kaitannya dengan ideologi dan minimnya pendidikan politik khususnya bagi masyarakat pedesaan.

Berpijak pada arah kebijakan dan fenomena di atas, guna mereduksi dan mengantisipasi hal hal tersebut maka tentunya diperlukan sebuah upaya sosialisasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa yang bertujuan untuk melatih, mengedukasi serta menginformasikan tentang pemilihan kepala desa sebagai sarana mewujudkan kedaulatan masyarakat desa.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilakukan melalui kombinasi dari 2 jenis metode utama yakni metode pendidikan masyarakat dan metode pelatihan. Metode pendidikan masyarakat merupakan bentuk metode penyuluhan yang bertujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat desa. Dalam metode ini diberikan sosialisasi secara dini mengenai metode pemilihan umum kepala desa di kalangan masyarakat desa. Sehingga mereka bisa mendapatkan sekaligus menerapkan pengetahuan tersebut dan menggunakan hak pilihnya. Selain itu, melalui metode pendidikan masyarakat berbasis sosialisasi ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dasar kepada pemilih dalam upaya menganalisis dampak perkembangan pemilu sesuai dengan perkembangan sistem politik.

Sedangkan metode pelatihan yaitu metode kegiatan yang melibatkan substansi kegiatan yang disertai dengan demonstrasi atau percontohan untuk realisasinya. Dalam metode ini diberikan simulasi atau latihan mengenai kepemiluan sehingga para pemilih bisa menerapkan tata cara dan praktik pemilu secara lebih teknis. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini disisi lain juga diharapkan bisa memberikan manfaat yakni bisa menambah referensi pengetahuan tentang praktik demokrasi dan ragam teknik pemilu secara benar serta membantu ketercapaian kompetensi dasar pemilih dalam mengenali dan menganalisis tipe-tipe budaya politik dan pemilu yang berkembang dalam masyarakat Indonesia termasuk dalam pemilihan kepala desa.⁴ Selain itu juga diharapkan bisa mereduksi jumlah angka golongan putih atau ketidakikutsertaan peserta pemilu khususnya pemilih akibat dari ketidaktahuan mengenai informasi kandidat dan tata cara pemilihan. Sehingga diharapkan sosialisasi dan pelatihan ini akan memberikan dampak langsung maupun tidak langsung dalam memberikan pemahaman kritis kepada para masyarakat desa tentang pentingnya memilih dengan cerdas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sabuhur adalah salah satu desa di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Asal nama desa Sabuhur berasal dari orang-orang Johor Malaysia yang sedang berlaut lalu mereka terdampar di muara Pantai Baru pada tahun 1885 dan setelah itu mereka menetap dan memberi nama Sabohor. Kemudian pada tahun 1995 nama desa tersebut di sempurnakan menjadi Sabuhur. Desa Sabuhur sekarang banyak di huni oleh penduduk transmigrasi yang berasal Pulau Jawa.⁵ Penduduk asli desa Sabuhur memang sudah lama menetap di desa ini, sebelum datangnya orang-orang yang berasal dari pulau Jawa tersebut. Setelah orang-orang dari Malaysia kembali ke negaranya, desa Sabuhur pun di huni oleh orang asli pribumi yang sudah tinggal dan menetap di desa itu.

Dilihat dari gambaran potret desa potensi yang cukup banyak untuk lebih dikembangkan baik dari segi SDA (Sumber Daya Alam) dan SDM (Sumber Daya Manusia). Dalam bidang SDA, hampir semua masyarakat mempunyai sumber penghasilan dari hasil pertanian dan perkebunan. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang perlu ditingkatkan mengingat pendidikan masyarakat pada umumnya hanya mengenyam sampai pada lulusan SLTP dikarenakan jarak tempuh dan biaya untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTA sangat terbatas.

Memberikan kesadaran bagi para pemilih masyarakat desa tersebut sebaiknya dilakukan sosialisasi termasuk cara pengaktualisasian hak politik secara benar dan tepat. Beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah melalui pengenalan metode pemilu, teknik memilih kandidat yang berkualitas sekaligus kiat memilih program dan visi misi calon secara cerdas, pengetahuan tentang sistem kepartaian, metode penhitungan suara hingga proses pemantauan pemilu.⁶ Hal lain yang turut mengkhawatirkan juga adalah penyadaran publik dalam sistem kepemiluan Indonesia yang hanya mengharapkan fungsi dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam setiap pemilu yang diadakan baik oleh pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.⁷

Selama ini, partai-partai politik belum mampu memainkan peran dalam upaya untuk mengedukasi para pemilih untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu.⁸ Padahal kelompok pemuda merupakan kelompok yang mempunyai hak suara namun pengetahuan

mereka terhadap pemilu masih belum optimal, apabila dibandingkan dengan kelompok lain yang sudah memiliki pengalaman dalam keikutsertaannya sebagai masyarakat pemilih.⁹

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) yang berjudul sosialisasi pemilihan kepala desa sebagai sarana mewujudkan kedaulatan masyarakat desa di desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini merupakan salah satu tahapan penting dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian Tridarma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan sebagai kewajiban dosen di Universitas Lambung Mangkurat. Pelaksanaan kegiatan pengabdian berlangsung dari jam 16.00 WITA s.d 17.00 WITA, dengan dihadiri sekitar 25 orang penduduk desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan yang dilakukan berupa penyampaian materi dan pelatihan langsung mengenai program sosialisasi pemilihan kepala desa sebagai sarana mewujudkan kedaulatan masyarakat desa. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu memberikan sosialisasi secara dini mengenai metode pemilihan umum Pilkadaes di kalangan penduduk desa sekaligus pemilih pemula dalam pemilu kepala desa tahun 2019 mendatang sehingga harapannya bisa terlaksana dengan baik. Mereka juga diharapkan bisa mendapatkan sekaligus menerapkan pengetahuan tersebut dan menggunakan hak pilihnya. Diharapkan kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi penduduk desa serta bagi pertumbuhan demokrasi di Kalimantan Selatan.

Manfaat tersebut diharapkan bisa berbentuk tambahan pengetahuan dasar kepada pemilih dalam upaya menganalisis dampak perkembangan pemilu sesuai dengan perkembangan sistem politik yang berlaku: menambah referensi pengetahuan tentang praktik demokrasi dan ragam teknik pemilu secara benar; membantu ketercapaian kompetensi dasar pemilih dalam mengenali dan menganalisis tipe-tipe budaya politik dan pemilu yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Serta diharapkan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini juga diharapkan mampu mereduksi jumlah angka golongan putih atau ketidakikutsertaan peserta pemilu khususnya pemilih akibat dari ketidaktahuan mengenai informasi kandidat dan tata cara pemilihan.

Para penduduk desa yang hadir tampak sangat antusias mendengarkan pelatihan yang disampaikan, hal ini terlihat dari banyaknya penduduk desa yang bertanya dan ingin mendapatkan penjelasan lebih mendalam tentang bagaimana cara memilih yang baik, termasuk memilih kandidat dalam pemilu. Berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun maka target luaran yang diharapkan setelah pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) adalah dapat ditunjukkan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Hasil Kegiatan PKM

No	Unsur	Pra PKM	Pasca PKM
1	Pengetahuan mengenai sistem pemilihan umum kepala desa	Masyarakat desa Sabuhur kesulitan memahami bagaimana sistem pemilihan umum kepala desa	Masyarakat desa Sabuhur memahami bagaimana sistem pemilihan umum kepala desa
2	Jenis jenis partisipasi dalam pemilu	Teridentifikasi kesulitan bagi Masyarakat desa Sabuhur untuk mengetahui jenis jenis partisipasi dalam pemilu	Masyarakat desa Sabuhur mampu mengidentifikasi jenis jenis partisipasi dalam pemilu

3	Struktur pemilihan umum kepala desa	Masyarakat desa Sabuhur bingung bagaimana Struktur pemilihan umum kepala desa	Masyarakat desa Sabuhur diberikan pengetahuan tentang struktur pemilihan umum kepala desa
4	Asas Penyelenggaraan pemilihan umum kepala desa	Masyarakat desa Sabuhur mengetahui tentang Asas Penyelenggaraan pemilihan umum kepala desa	Masyarakat desa Sabuhur memahami Asas Penyelenggaraan pemilihan umum kepala desa
5	Partisipasi masyarakat desa	Masyarakat desa Sabuhur tidak mengetahui Partisipasi masyarakat desa	Masyarakat desa Sabuhur diberikan pemahaman mengenai apa saja bentuk Partisipasi masyarakat desa
6	Pemilu, politik dan sosial media	Bagi Masyarakat desa Sabuhur pembahasan politik dan pemilu di sosmed merupakan sesuatu yang tidak baik	Masyarakat desa Sabuhur diberikan pemahaman bahwa pemilu dan politik merupakan hal yang lumrah dibahas dalam sosial media dan kehidupan sehari-hari
7	Partisipasi politik	Masyarakat desa Sabuhur menganggap partisipasi politik tidak merupakan sesuatu yang penting	Merubah pemikiran dan anggapan Masyarakat desa Sabuhur bahwa partisipasi politik sangat penting dalam negara dengan sistem demokrasi

Dalam tahapan kedua, juga diberikan simulasi pemilihan kepala desa secara langsung sehingga masyarakat desa bisa memahami secara teknis pelaksanaan pemilihan. Selain itu dalam tahapan kedua diberikan substansi kegiatan yang disertai dengan demonstrasi atau percontohan untuk realisasinya. Dalam metode ini diberikan simulasi atau latihan mengenai kepemiluan sehingga para pemilih bisa menerapkan tata cara dan praktik pemilu secara lebih teknis.

Argumentasi pokok dalam sosialisasi politik ini menegaskan bahwa peranan masyarakat sebagai agen perubahan (*agent of change*) sangat penting terhadap kondisi politik. Dalam konteks itulah kegiatan ini menjadi penting dilakukan dalam pengabdian masyarakat khususnya terkait dengan sosialisasi pemilihan kepala desa sebagai sarana mewujudkan kedaulatan masyarakat desa.

SIMPULAN

Sosialisasi pemilihan kepala desa sebagai sarana mewujudkan kedaulatan masyarakat desa. Cara yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pemberian informasi dengan menggunakan metode pendidikan masyarakat berbasis sosialisasi serta metode pelatihan yang memudahkan bagi semua pihak untuk mengakses informasi dan menyampaikan informasi yang diperolehnya. Dalam kegiatan ini masyarakat desa Sabuhur mengikuti kegiatan dengan sangat antusias karena sesuai dengan konteks pelaksanaan pemilihan umum kepala desa serentak di Kabupaten Tanah Laut.

Sosialisasi politik maupun pendidikan politik mempunyai tujuan serta fungsi yang sama secara prinsipnya. Kegiatan ini merupakan bentuk dari sosialisasi politik yakni suatu proses dalam melakukan internalisasi konsep, nilai-nilai, ide atau gagasan, pengetahuan, sikap dan perilaku untuk memunculkan keikutsertaan (partisipasi) yang efektif di dalam kelompok atau institusi politik. Proses sosialisasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan guna memberikan pemahaman ataupun internalisasi suatu gagasan atau nilai-nilai politik kepada orang lain (dalam hal ini pemilih di masyarakat desa) agar nantinya memunculkan suatu sikap politik yang bersifat partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N. (2007). *Golput Dalam Pilkada*. Kajian Bulanan Edisi 05. Lingkaran Survey Indonesia (LSI). Jakarta. 2007.
- Al Syahrin, M. N. (2013). Peran Open Society Foundations (OSF) Terhadap Demokratisasi di Myanmar Pasca Penolakan Hasil Pemilu Myanmar tahun 1990. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.
- Alfayed, D., Dharmono, D., & Riefani, M. K. (2022). Kajian Etnobotani Mahoni (*Swietenia mahagoni*) di Kawasan Desa Sabuhur Kabupaten Tanah Laut. *NECTAR: Jurnal Pendidikan Biologi*, 3(1), 1-8.
- Amrizal, D., & Dalimunthe, A. H. (2018). *Penanggulangan Golput dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Azhar, A. A. (2018). Marketing of Political Communication Created by National Mandate Party (PAN) in General Election 2005-2015, North Sumatra, Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 1(2), 93-106.
- Denny, K., & Doyle, O. (2008). Political interest, cognitive ability and personality: Determinants of voter turnout in Britain. *British journal of political science*, 38(2), 291-310.
- Rachman, D., & Syahrin, A. M. N. (2018). Pelatihan Komunikasi Teman Sebaya Sebagai Upaya Meminimalisasi Bullying Disekolah Menengah Atas Negeri (SMA) 16 Samarinda. *Abdimas Mahakam Journal*, 2(2).
- Sanit, A. (2008). Sistem politik Indonesia: kestabilan, peta kekuatan politik dan pembangunan.
- Sarip, S., Syarifudin, A., & Muaz, A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Dan Pembangunan Desa. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 10-20.